# INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIMASA COVID-19 (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**MARIA TRISANTI UNA** 

2017110150

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI** 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

**MALANG** 

2021

**RINGKASAN** 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian

dilaksanakan di BPD (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang yang berlokasi di Jl.

Raden Panji Nomor 158, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Alasan

peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana penerimaan pajak daerah

terhadap pendapatan asli daerah. Terdapat dua jenis sumber data pada penelitian ini, yaitu

sekunder dan primer. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara

(interview), dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, teknik analisa data yang digunakan

adalah perhitungan rumus, yaitu Efektivitas Jenis Pajak Daerah. Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak daerah selama masa covid-19 adalah

sebesar 131,28. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas pajak daerah sangat efektif. Sedangkan

efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa covid-19 adalah sebesar

114,70%, hal ini membuktikan bahwa efektivitas PAD hasilnya sangat efektif. BPD Kabupaten

Malang telah melakukan aktivitas yang mana merupakan sebuah cara untuk memaksimalkan

PAD. Aktivitas intensifikasi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan

dengan tujuan BPD di Kabupaten Malang. Adapun intensifikasi dapat dilaksanakan dalam

bentuk: 1, menerapkan sosialisasi, 2. memaksimalkan peningkatan pada sistem pengawasan,

3. memaksimalkan SDM, serta memaksimalkan informasi terhadap pajak daerah.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia terus melakukan upaya melawan virus corona seperti halnya dengan negara lain. Kasus virus corona memiliki jumlah yang terus bertambah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kesembuhan dan angka kematian. Berbagai upaya penanganan dan pencegahan dilakukan untuk melawan Covid-19 yang memiliki gejala flu tersebut. Awal munculnya kasus virus corona disebabkan melalui penyakit yang tidak diketahui asalnya yang dapat melumpuhkan kota Wuhan di negara China. Virus yang muncul pada akhir 2019 semakin berkembang penyebarannya hingga keseluruh dunia.

Pandemi Covid-19 memiliki keterbatasan ruang gerak yang berpengaruh pada pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi, sehingga berdampak bagi penerimaan negara. Pemerintah saat ini memiliki prioritas utama dalam menangani kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional dengan mengadakan kegiatan vaksinasi. Pembiayaan prioritas tersebut diperoleh melalui penerimaan Negara, seperti pajak. Kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak harus secara intens dan extra, mengingat perekonomian nasional sangat dibantu oleh berbagai dukungan dari segi manapun termasuk bagi pihak yang membayar pajak. Dengan cara kita membayar pajak terusmenerus sangat menopang perekonomian negara Indonesia khususnya di masa sulit seperti ini karena terganggu dengan pandemi (Redaksi Pajak Online, 2021).

Pembangunan daerah merupakan salah satu dari tujuan pemerintah agar bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Dari berbagai daerah pada masa sekarang ini sangat berlomba-lomba agar bisa maju dan tidak dikatakan daerah tertinggal karena perekonomian yang semakin sulit tetapi tidak dengan masyarakat yang penuh dengan semangat untuk kemajuan daerah tersebut (Mirdah dan Yanti, 2015). Pada kabupaten Malang sampai saat ini bisa dilihat pembangunannya sedang diusahakan dengan cara mengatur lingkungan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pendapatan yang masuk pada kas daerah paling besar bersumber dari pajak daerah tersebut. Semakin besar wajib pajak menyetor semakin besar juga daerah tersebut tidak bergantung hidup pada pemerintah pusat. Dari permasalahan ini kabupaten Malang sangat membutuhkan dana agar bisa membiayai semua aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan daerah tersebut, salah satu penghasilan yang bisa membantu yakni bersumber dari pajak. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang ditentukan kemudian dikumpulkan dalam wilayah lokal (Muluk, 2006:77-78).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan dua upaya, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kedua upaya melihat potensi yang ada di daerah tersebut apakah sangat efektif untuk menerima pajak yang sangat besar atau tidak (Dini Kusumawardani, 2010:2). Di Kabupaten Malang potensi pajak yang memiliki peningkatan setiap tahunnya adalah pajak daerah. Setiap tahun pajak di kabupaten Malang terus mengalami peningkatan karena potensi yang sangat menunjang untuk pemasukan ke kas daerah tersebut. Tidak secara kebetulan melainkan banyaknya pengusaha yang memiliki bisnis pertokoan rumah makan kos-kosan serta masih banyak lagi.

Pada tahun 2020 awal mula munculnya virus Corona termasuk Kabupaten Malang adalah kota yang terjangkit virus hal ini yang menyebabkan menurunnya pendapatan dari berbagai usaha baik kecil maupun besar yang berdampak pada kurangnya pemasukan pada pengusaha dan semakin kecil bagi wajib pajak untuk menyetorkan pajak pada pemerintah. Beberapa tahun ini terdampaknya covid-19

memberi pengaruh yang sangat buruk khususnya sektor kesehatan sosial maupun ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat guna mencegah penularan Covid-19. Segala aktivitas dibatasi maka akan berpengaruh untuk segala pendapatan oleh masyarakat. Dari segi ekonomi salah satunya yaitu tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang apakah akan meningkat atau menurun. Menurut sumber pendapatan yang masuk sampai saat ini sebesar Rp 509.999.102.596 dan jumlah sebelum Covid-19 yaitu Rp.584.960.596.005. Jadi mengalami penurunan sebesar Rp. 74.961.493.843.

Penerimaan pajak sangat berpengaruh pada kas daerah tersebut karena dilihat dari pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dari uraian permasalahan diatas pandemi tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat melainkan semakin turun angka penerimaan pajak bagi pihak pemerintah, maka dari hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan judul "Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)".

#### 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimasa Covid-19?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan bagi beberapa pihak sebagai berikut :

## 1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat keputusan agar masyarakat bisa menjalankan usahanya dan mendapatkan penghasilan yang lebih juga menekan pembayaran pajak agar tidak membuat pelaku usaha beban dalam membayar pajak.

# 2. Bagi Universitas

Dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan sama namun objek yang berbeda.

# 3. Bagi Pembaca

Memberi pemahaman bagi kaum pembaca agar bisa mengerti cara pemungutan pajak agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lexy J. Moleong. 2005. *Meteodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novi Andriani, Amin P. 2017. Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, (1).
- Nursafita M, M. Y. 2017. Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enkreng. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Vol. 5, (1): IISN 2088-746
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo, M., & Priansa, D.J. 2018. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Konsep-Konsep Kunci*. Bandung:Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. Nomor 28 (2009).
- Peraturan Bupati Malang No 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. Nomor 9 (2010).
- Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. Nomor 10 (2010).
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Sebagai Landasan Hukum
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Definisi Umum, Objek Pajak, Subjek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak dan Objek Pajak Yang Dikecualikan Dalam Pemungutan Pajak Daerah.
- Wildah Mazafa, Yuniadi Mayowandan, T. H. S. 2018. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11 (1)..